

## HUBUNGAN INFORMASI SILPA APBD DAN ARUS KAS DENGAN PENGANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Oleh : Moh. Syadeli \*)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari SiLPA APBD, Arus Kas Operasi, Arus Kas investasi, arus kas pendanaan terhadap penganggaran belanja modal.

Sumber data penelitian ini adalah laporan keuangan kabupaten dan kota yang ada pada pemerintah daerah provinsi NTT dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas terdiri dari informasi SiLPA APBD, Arus Kas Operasi (CFO), Arus Kas Investasi (CFI) dan Arus Kas Pendanaan (CFF), sedangkan variabel terikat terdiri dari Belanja modal.

Hasil penelitian ini adalah secara simultan keempat variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap penganggaran belanja modal, secara parsial ke empat variabel bebas juga berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal dan yang paling dominan adalah variabel CFI (X3) atau Arus Kas Investasi..

Kata.kata kunci: SiLPA, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus KAs Pendanaan, Belanja Modal, Laporan Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah.

### Abstract

*This study aims to test and analyze the influence of the SiLPA APBD, Operating Cash Flow, Investment Cash Flow, funding cash flows on capital expenditure budgeting. The source of this research data is the district and city financial statements that exist in the NTT provincial government within a period of 5 years, from 2012-2016. This study uses 2 variables, namely independent and bound variables. The independent variable consists of SiLPA APBD information, Operating Cash Flow (CFO), Investment Cash Flow (CFI) and Funding Cash Flow (CFF), while the dependent variable consists of capital expenditure.*

*The results of this study are that simultaneously the four independent variables have a significant effect on capital expenditure budgeting, partially the four independent variables also have a significant effect on capital expenditure budgeting and the most dominant is the CFI (X3) or Investment Cash Flow variable.*

*Key words: SiLPA, Operating Cash Flow, Investment Cash Flows, Funding Flow Assets, Capital Expenditures, Regional Financial Reports, Regional Financial Capabilities.*

### 1. Pendahuluan

Dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Undang-undang ini menyadari bahwa pada dasarnya otonomi daerah maupun desentralisasi

manajemen ditujukan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian peran DPRD dalam melakukan kontrol kinerja pemerintah daerah sangat menentukan guna terbentuknya transparansi anggaran sebagai bentuk untuk pertanggungjawaban kepada kepentingan

\*) Moh.Syadeli, adalah Dosen STIE Malangkecwara Malang

publik (Halim ; 2001, 2001). Informasi SiLPA merupakan salah satu parameter kerja organisasi pemerintah daerah yang mendapat perhatian utama dan pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2002). Haryanto (2013) menjelaskan bahwa informasi SiLPA APBD yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu indikator bagi rekanan pemerintah daerah dalam membuat keputusan perencanaan investasi.

Selain SiLPA APBD, pemangku kepentingan juga menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah. Kandungan informasi arus kas dapat diukur dengan menggunakan kekuatan hubungan antara variabel akuntansi ( arus kas) dengan penganggaran modal.

Penelitian ini melakukan pengujian lanjutan mengenai *value-relevance* arus kas pada sektor non-bisnis dalam hal ini sektor pemerintahan. pengujian dilakukan dengan memasukkan klaster pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini mengikuti pola rerangka model penelitian yang dikembangkan oleh Black (1998) dan Ekawati (2005).

## **2.Tinjaua Pustaka**

### **2.1.Tinjauan Empiris**

Haryanto (2013) menggunakan variabel penganggaran belanja modal sebagai variabel Y untuk mengukur kekuatannya dengan informasi SiLPA APBD (X1) dan arus kas operasi (X2), investasi (X3) dan pendanaan (X4). Penggunaan variabel ini dimaksudkan untuk

mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sularso (2011) menyatakan bahwa alokasi belanja modal yang mempengaruhi belanja ,modal adalah investasi berupa pembelian aset yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Hasil penelitian Atmini (2002) menunjukkan adanya bukti empiris bahwa arus kas pendanaan mempunyai *value-relevance* pada *growth*, sedangkan pada *mature* hanya arus kas dari investasi yang mempunyai *value relevance*. Penelitian ini melakukan pengujian lanjutan mengenai *value-relevance* arus kas pada sektor non-bisnis dalam hal ini sektor pemerintahan.

### **2.2.Tinjauan Teori**

#### **2.2.1. Definisi Anggaran Daerah**

Menurut Sugianto (2005:22) anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode tertentu beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

#### **2.2.2. Definisi SiLPA APBD**

SiLPA APBD adalah bagian dari laporan realisasi anggaran yang dilaporkan bersamaan dengan anggaran tahun tersebut. Menurut Hariyanto (2013) SiLPA APBD menjadi salah satu faktor yang digunakan oleh rekanan pemerintah.

### **2.2.3. Akuntansi Pendapatan, Belanja Modal dan Pembiayaan.**

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 tahun 2011 adalah “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas umum daerah membuat keputusan investasi.

Menurut Nordiawan (2007), “Beban di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan sebagai arus kas keluar dari asset atau segala bentuk penggunaan asset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas”.

Pembiayaan berbasis kas maupun akrual adalah sama (Erlina, 2015:205). Menurut PP 71 tahun 2010 tentang PSAP 02 mendefinisikan bahwa pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan adalah untuk menutupi deficit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **2.2.4. Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

### **2.2.5. Klaster Kemampuan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klaster yaitu: Klaster a, Klaster b, Klaster c,

## **3. Metodologi Penelitian**

### **3.1. Populasi dan Sampel**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif

### **3.2. Variabel Penelitian**

a. Variabel dependen (Y) untuk penelitian ini adalah penganggaran belanja modal yang ada dalam APBD pada saat pelaporan tahun 2010-2014.

b. Variabel independen ( $X_1$ ) untuk penelitian ini adalah SiLPA APBD dari perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. SiLPA APBD adalah selisih lebih dari realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD dalam satu tahun atau satu periode pelaporan.

Pengukurannya : Surplus/Defisit – Pembiayaan Netto. Variabel independen yang berikutnya adalah Arus kas yang terbagi atas tiga yaitu : Arus Kas dari Aktivitas Operasi ( $X_2$ ), Arus Kas dari Aktivitas Investasi ( $X_3$ ), dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan ( $X_4$ ).

### **3.3. Populasi.**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten dan kota yang ada pada pemerintah daerah provinsi NTT. Untuk mencapai tujuan penelitian maka pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*

### **3.4. Metode Analisis**

#### **a. Uji Assumsi klasik.**

Setidaknya ada empat uji asumsi klasik, yaitu : Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji /heterokedasitas, dan Uji Normalitas

## **b. Uji hipotesis**

Model analisis data yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis adalah model regresi linier berganda

## **4. Hasil Penelitian dan Bahasan**

### **4.1. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, jumlah populasinya ada 105 dimana diperoleh dari 20 Kabupaten dan 1 kota yang telah melaporkan data keuangan daerahnya dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Data tersebut berupa data SiLPA APBD, Arus kas Operasi, Arus kas Inventasi, Arus kas Pendanaan dan Belanja Modal. 21 kabupaten dan Kota itu antara lain :

1. Kabupaten Alor
2. Kabupaten Flores Timur
3. Kabupaten Lembata
4. Kabupaten Manggarai
5. Kabupaten Manggarai Timur
6. Kabupaten Manggarai Barat
7. Kabupaten Sikka
8. Kabupaten Ende
9. Kabupaten Ngada
10. Kabupaten Nagekeo
11. Kabupaten Sumba Timur
12. Kabupaten Sumba Tengah
13. Kabupaten Sumba Barat
14. Kabupaten Sumba Barat Daya
15. Kabupaten Sabu Raijua
16. Kabupaten Kupang
17. Kabupaten TTS
18. Kabupaten TTU
19. Kabupaten Belu
20. Kabupaten RoteNdao

## 21. Kota Kupang

Kemampuan keuangan daerah 21 kabupaten dan kota yang ada pada pemerintah daerah provinsi NTT selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang masuk dalam klaster C (terbawah). Untuk itu sampel yang digunakan adalah klaster C karena keseluruhannya masuk dalam klaster C dan juga penentuan sampel dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam permendagri 21 tahun 2007 yaitu : Pendapatan Umum Daerah-Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

Selama tahun 2012-2016 pada 21 kabupaten didapatkan rata-rata SiLPA sebesar 55,319 milyar rupiah, CFO sebesar 125,376 milyar rupiah, CFI sebesar -84,086727 milyar rupiah, CFF sebesar 0,627 milyar rupiah, dan BM sebesar 101,822 milyar rupiah.

### **Uji asumsi klasik**

Hasil pengujian asumsi normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai signifikansi (p-value) terhadap residual sebesar 0.364 lebih dari alpha (0.050) menunjukkan bahwa distribusi dari residual model adalah normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi

Hasil pengujian non multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) didapatkan nilai VIF pada variabel bebas lebih kecil dari 10, artinya tidak terdapat hubungan linier variabel antar variabel bebas, sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

Hasil analisis pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya

heterokedastisitas pada model yang diuji sehingga Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode Durbin Watson didapatkan nilai DW sebesar 2.152 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan termasuk dalam daerah tidak terdapat autokorelasi karena nilai DW terletak antara nilai dU (1.762) dan 4-dU (2.238) sehingga tidak terdapat autokorelasi.

asumsi ini terpenuhi.

#### **Pengujian Regresi**

Hasil perhitungan regresi linier antara SiLPA, CFO, CFI, CFF terhadap BM disajikan sebagai berikut. Persamaan regresi yang terbentuk yaitu:

$$BM = 86.281 - 0.128 \text{ SiLPA} - 0.170 \text{ CFO} - 0.526 \text{ CFI} + 1.031 \text{ CFF} + e$$

Dari persamaan regresi linier dapat dijelaskan bahwa:

- a. Koefisien konstanta ( $\beta = 86.281$ ) menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari SiLPA, CFO, CFI, CFF maka nilai BM sebesar 86.281 milyar rupiah.
- b. Koefisien regresi antara SiLPA terhadap BM ( $\beta = -0.128$ ) menunjukkan bahwa setiap 1 milyar rupiah SiLPA akan mempengaruhi nilai BM sebesar -0.128 milyar rupiah.
- c. Koefisien regresi antara CFO terhadap BM ( $\beta = -0.170$ ) menunjukkan bahwa setiap 1 milyar rupiah CFO akan mempengaruhi nilai BM sebesar -0.170 milyar rupiah.
- d. Koefisien regresi antara CFI terhadap BM ( $\beta = -0.526$ ) menunjukkan bahwa setiap 1 milyar rupiah CFI akan mempengaruhi nilai BM sebesar -0.526 milyar rupiah.
- e. Koefisien regresi antara CFF terhadap BM ( $\beta = 1.031$ ) menunjukkan bahwa setiap 1 milyar

rupiah CFF akan mempengaruhi nilai BM sebesar 1.031 milyar rupiah.

#### **4.2. Bahasan**

Pemerintah daerah provinsi NTT merupakan pemerintah daerah yang berada pada klaster C atau terbawah dengan kemampuan keuangan daerahnya dibawah 200.000.000.000 sesuai dengan Permendagri nomor 21 tahun 2007. Pemerintah yang masuk dalam klaster C adalah pemerintah daerah yang banyak melakukan pengeluaran kas untuk pembangunan fisik (infrastruktur), peninjauan investasi langsung dari sector swasta ke daerah atau dengan kata lain pemerintah daerah sedang dalam masa pertumbuhan untuk pembangunan daerahnya.

Dari temuan diatas menggambarkan bahwa informasi silpa berpengaruh negative terhadap penganggaran belanja modal.

Alokasi dana SiLPA Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto (2013) yang mengemukakan bahwa SiLPA berpengaruh positif pada penganggaran belanja modal pemerintah daerah Klaster C. Semakin tinggi SiLPA menunjukkan penganggaran belanja modal yang tinggi. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka (2014) yang mendapatkan hasil dana SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal yang berarti semakin tinggi nilai SiLPA semakin tinggi penganggaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bali.

Pada arus kas operasi yang berpengaruh negative terhadap penganggaran belanja modal menunjukkan bahwa arus kas operasi pemerintah daerah pada klaster C tergolong rendah karena

pemerintah daerah sedang dalam masa pembangunan dan pengembangan infrastrukturnya sehingga penganggaran belanja modalnya tinggi. Pengaruh negative ini disebabkan karena pemerintah daerah belum mampu menghasilkan arus kas masuk yang lebih besar daripada arus kas keluarnya sehingga arus kas operasi bernilai negative yang berdampak pada penganggaran belanja modal yang tinggi untuk menghasilkan arus kas yang positif juga pada tahun berikutnya. Perbedaan penelitian terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2005) dan Hariyanto (2013) yang mendapatkan hasil bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Perbedaan ini terjadi karena kondisi obyek yang diteliti walaupun sama pada klaster C, namun prospek untuk bertumbuhnya yang beda.

Selanjutnya pada arus kas investasi, pada hasil pengujian ini nilai arus kas investasi bernilai negative karena pemerintah daerah pada klaster ini banyak melakukan pengeluaran dibidang investasi. Nilai yang negative menunjukkan pemerintah daerah terus meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sehingga penganggaran belanja modal tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto (2013) yang mengemukakan bahwa arus kas investasi berpengaruh negative terhadap penganggaran belanja modal. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Black (1998) pada sector bisnis bahwa arus kas investasi berpengaruh negative terhadap kemampuan keuangan.

Terakhir pada arus kas pendanaan/pembiayaan, pemerintah daerah yang berada pada klaster C membutuhkan banyak pembiayaan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur mengingat pemerintah daerah pada klaster C merupakan pemerintah daerah terbawah. Dari hasil pengujian diatas membuktikan bahwa Arus kas pendanaan pada pemerintah daerah provinsi NTT bernilai positif atau memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal yang menunjang hipotesis untuk diterima. Arus kas pendanaan yang positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah mendapat sumber dana baik dari pihak swasta atau rekan pemerintah atau yang bersumber lain dalam melangsungkan pengembangan dan pembangunan infrastrukturnya. Pengujian hipotesis ini berarti semakin tinggi nilai arus kas pembiayaan/pendanaan maka semakin tinggi juga nilai penganggaran belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Black (1998) yang dikutip dari Hariyanto (2013) baik perusahaan atau pemerintahan pada klaster C (terbawah) harus membutuhkan pendanaan yang besar untuk memulai aktivitasnya atau dengan kata lain pemerintah daerah harus memiliki nilai arus kas pendanaan yang positif untuk mengembangkan dan mempertahankan potensi yang ada serta menguasai teknologi agar dapat tumbuh.

## **5.Simpulan dan Saran**

### **5.1.Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Informasi SiLPA dan Arus Kas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada provinsi NTT pada klaster kemampuan keuangan pemerintah daerah C.
2. Pada klaster C, secara parsial informasi SiLPA, arus kas operasi dan Arus kas investasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap penganggaran belanja modal sedangkan arus kas Pendanaan memiliki pengaruh yang positif terhadap penganggaran belanja modal sehingga hipotesis dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat diterima.

## 5.2.Saran

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku kepentingan di pemerintah daerah dalam membuat keputusan ekonomi khususnya kepada rekanan/kontraktor dan pemerintah pusat dalam menilai kapasitas keuangan pemerintah daerahnya. Informasi tentang SiLPA dan arus kas memiliki relevansi terhadap penganggaran belanja modal secara signifikan sehingga dapat digunakan sebagai perencanaan kebijakan penganggaran dan keputusan investasi.
2. Disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga hasil analisisnya tidak bias atau maya

## 6. Daftar Rujukan

- Atmini, dan Sari, (2002). Asosiasi Siklus Hidup Perusahaan dengan Incremental Value-Relevance Informasi Laba dan Arus Kas. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5, No.3 (September 2002): 257-276.
- Black, E.L. (1998). Which is More Value Relevance: Earnings or Cash Flows? A Life Cycle Examination. *Journal of Financial Statement Analysis*.
- Ekawati, Erni. (2005). Level of Growth and Accounting Profitability in Corporate Value Creation Strategy. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 8, No.1. (Januari 2005): 50-64.
- Halim, Abdul. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat
- Hariyanto, (2013). *Hubungan Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas dengan Penganggaran Belanja Modal (Klaster Permendagri Nomor 21 Tahun 2007)*. Undip Press Semarang (tidak diperjualbelikan).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, CV. Andi Offset Yogyakarta.
- Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarti, Ni Luh Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Nordiawan, Deddi, Ishwahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat.
- Erlina (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Sularso, Hafid. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Undip Press Semarang (tidak diperjualbelikan).